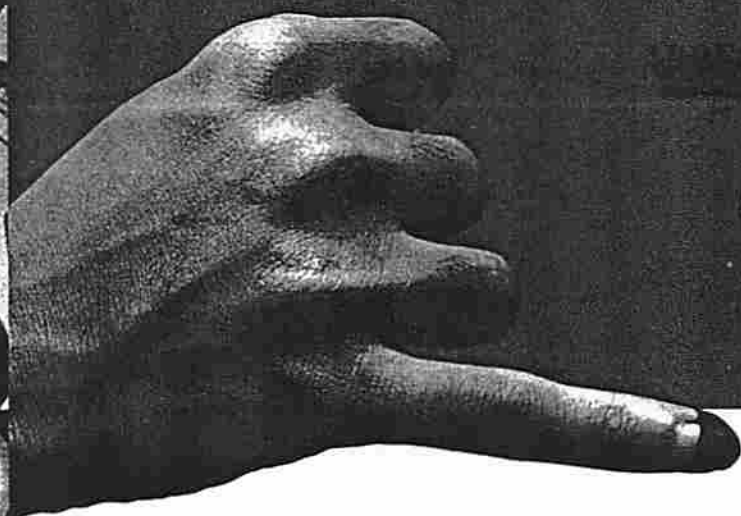




BULETIN

GERBANG BALITBANGDAKU

VOL. IX NO. 21 EDISI MEI 2014



**PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN
MELALUI KEMITRAAN USAHATANI KELAPA
SAWIT**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
MENUJU REFORMASI BIROKRASI SESUNGGUHNYA**



bukan untuk menang atau kalah,
MEMILIH adalah sebuah keberanian menentukan masa depan bangsa.

Buletin Gerbang Balitbangdaku

Vol. IX No. 21 Edisi Mei 2014

APRESIASI PRESTASI DAN PROBLEMATIKA
PEMILU INDONESIA

Hal. 5

ISLAM MENGAJARKAN KITA
BERSIKAP RAMAH LINGKUNGAN

Hal. 14

PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI
KEMITRAAN USAHA TANI KELAPA SAWIT

Hal. 19

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SOLAR CELL
SEBAGAI ENERGI LISTRIK TERBAHARUI

Hal. 30

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
HUTAN

Hal. 39

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA MENUJU
REFORMASI SESUNGGUHNYA

Hal. 56

HARTA
Hal. 65

Pengarah

Kepala Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara

Penganggung Jawab

Sekretaris Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara

Pimpinan Redaksi

Dr. Ir. I. B. M. Agung Dwijatenaya, M. Si

Redaktur Pelaksana

Herianto, S. Sos <> Rita Ariani, SE <> Muhammad Nupiar

Agus Sofan, SE <> Beny Susanto

Editor

Dr. Achmad Jais, SE., M. Si <> Hadi Sucipto, S. Sos., M. Si

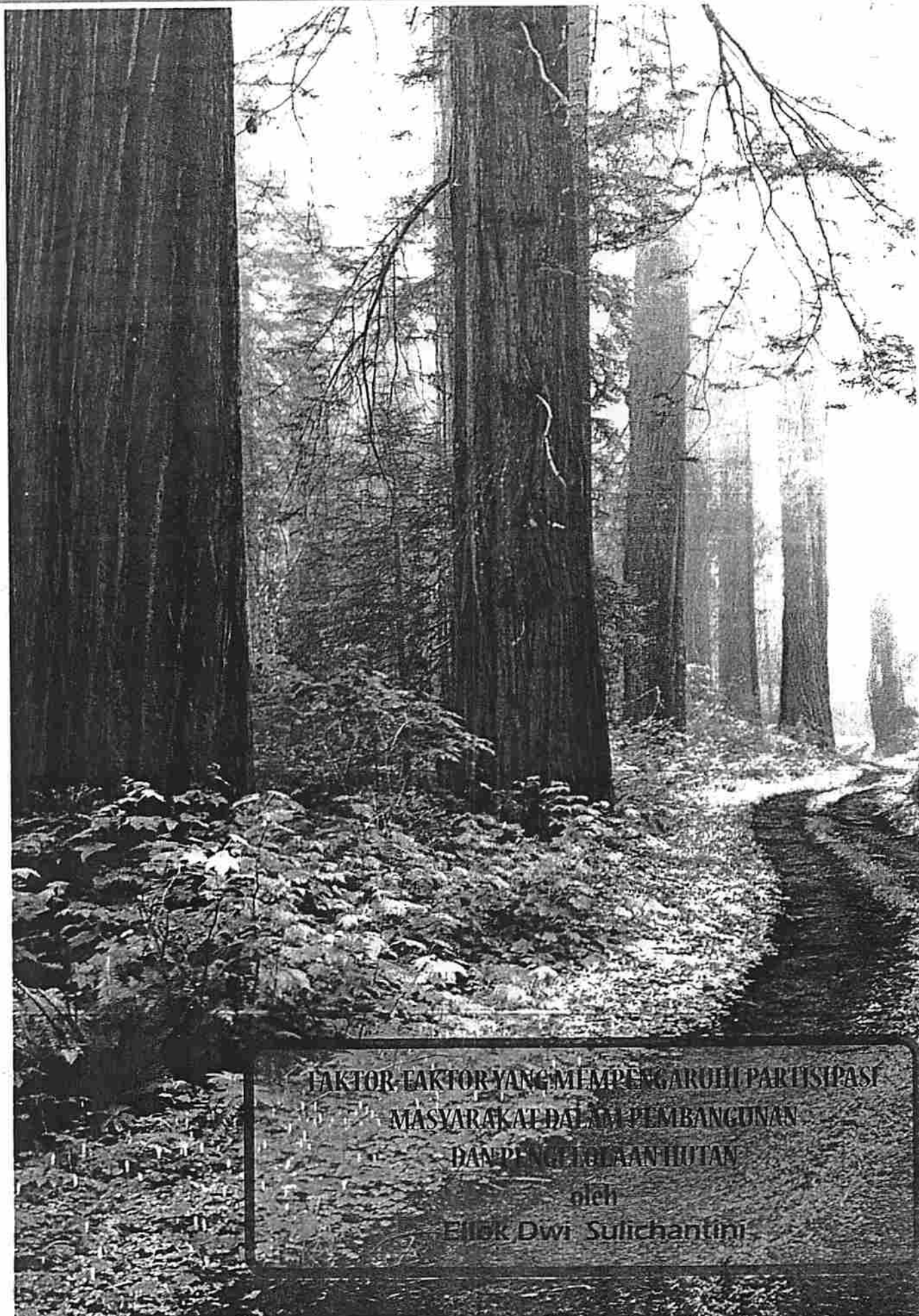
Ir. Dwi Utomo, M. Si <> Moh. Dahlan, SE, M. Si

Desain Grafis & Layout

Fathimatuzzuhroh, ST <> Yuni Fitriah

Alamat Redaksi

Jln. Wolter Monqinsidi Komplek Kantor Bupati Gedung BAPPEDA-BALITBANGDA Lt. 4 Tenqgarong Kutai Kartanegara



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DAN PENGELOLAAN HUTAN
oleh
Eliek Dwi Sulichantini

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan hutan rakyat sangat tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat dan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Suatu program sering mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini terjadi karena kegiatan yang dilakukan sering kali menggunakan pendekatan dari atas sehingga keinginan dari masyarakat kurang disalurkan dan berakibat pada partisipasi yang bersifat pasif. Pendekatan dari bawah sangat diperlukan untuk mengantisipasi agar program tersebut berjalan, sehingga semua aspirasi masyarakat relatif diakomodasikan dan berimbas pada partisipasi aktif dari masyarakat dalam semua kegiatan yang akan dilakukan. Pendekatan ini menjanjikan keberhasilan kegiatan yang akan dilaksanakan karena kegiatan tersebut mencerminkan keinginan masyarakat pada umumnya (Iswantoro, 1996). Menurut Soetrisno (1995) partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional merupakan salah satu prasyarat utama untuk keberhasilan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan hutan rakyat dapat dilihat dari keberhasilan

berbagai daerah di Indonesia.

II. PENGERTIAN MASYARAKAT

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama, seperti sekolah, keluarga, perkumpulan, dan Negara, semua adalah masyarakat

Dalam ilmu sosiologi kita kita mengenal ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat petambayan. Pada masyarakat paguyuban terdapat hubungan pribadi antara anggota-anggota yang menimbulkan suatu ikatan batin antara mereka, kalau pada masyarakat patambayan terdapat hubungan pamrih antara anggota-anggotanya.

Unsur-unsur suatu masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu lama disuatu daerah tertentu.
- c. Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Dipandang dari cara terben-

1. Masyarakat paksaan, misalnya negara, masyarakat tawanan

2. Masyarakat mardeka

a). Masyarakat natur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya, seperti: suku (stam), yang bertalian karena hubungan darah atau keturunan.

b). Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang terjadi karena kapantingn keduniaan atau kepercayaan.

Masyarakat dipandang dari sudut Antropologi terdapat dua tipe masyarakat:

1). Masyarakat kecil yang belum begitu kompleks, belum mengenal pembagian kerja, belum mengenal tulisan, dan tehknologi nya sederhana.

2). Masyarakat sudah kompleks, yang sudah jauh menjalankan spesialisasi dalam segala bidang, karena pengetahuan modern sudah maju, tehknologi pun sudah berkembang, dan sudah mengenal tulisan.

Faktor-faktor yang mendorong manusia untuk hidup adalah sebagai berikut :

a). Hasrat sosial

Hasrat sosial adalah meruknakan hasrat yang ada

tuk menghubungkan dirinya kepada individu lain atau kelompok

- b). Hasrat untuk mempertahankan diri.

Hasrat untuk mempertahankan diri adalah hasrat untuk mempertahankan diri dari berbagai pengaruh luar yang mungkin datang kepada nya, sehingga individu tersebut Faktor-faktor yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat perlu bergabung dengan individu lain atau kelompok.

- c). *Hasrat berjuang.*

Hasrat ini dapat kita lihat pada adanya persaingan, keinginan membantah pendapat orang lain. Sehingga mereka mengadakan persatuan untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan bersama.

- d). Hasrat harga diri.

Rasa harga diri merupakan hasrat pada seseorang untuk menganggap atau bertindak atas dirinya lebih tinggi dari pada orang lain, karena mereka ingin mendapat penghargaan yang selayaknya.

- e). Hasrat meniru, adalah hasrat untuk menirukan

terang-terangan sebagian dari salah satu gejala atau tindakan.

- f). Hasrat bergaul, adalah hasrat untuk bergabung dengan orang-orang tertentu, kelompok tertentu, atau masyarakat tertentu dalam suatu masyarakat.

- g). Hasrat untuk mendapatkan kebebasan.

Hasrat ini tampak jelas pada tindakan-tindakan manusia bila mendapat kekangan-kekangan atau pembatasan-pembatasan.

- h). Hasrat untuk memberitahukan.

Hasrat untuk menyampaikan perasaan-perasaan kepada orang lain biasanya disampaikan dengan suara atau isyarat.

- i). Hasrat simpati

Kesanggupan untuk dengan langsung turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.

Masyarakat merupakan gabungan dari individu-individu, oleh karena itu setiap individu harus bisa menjadi masyarakat yang modern, dalam arti tanggap akan perubahan-perubahan zaman, untuk itu masyarakat harus bisa menguasai IPTEK yang semangkin

Modernisasi adalah proses perubahan masyarakat dan kebudayaan dalam seluruh aspeknya, dari sistem tradisional menuju ke sistem yang modern.

Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain :

1. perkembangan ilmu
2. perkembangan teknologi
3. perkembangan industri
4. perkembangan ekonomi

Social Change adalah gejala sosial yang dijumpai diseluruh dunia dan tidak terbatas pada negara-negara berkembang saja, *social change* adalah perubahan sosial dalam pergaulan hidup manusia dan akibat-akibatnya terhadap pergaulan hidup manusia itu sendiri. Perubahan tersebut telah menjadi fakta kehidupan manusia sejak dahulu kala, serta merupakan reaksi atas rangsangan dari luar, perubahan tersebut dapat menimbulkan efek yang positif dan negatif.

Kalau berbicara *social change* maka yang terpikirkan adalah *social change* abad ke 20 ini, yaitu akibat kelanjutan perubahan kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi serta penggunaannya oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaannya telah mengakibatkan serta pengaruhnya terhadap sosial politik, ekonomi, tetapi juga pada fisik dan susila terha-

change adalah demi kemajuan anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan dan realisasi perubahan-perubahan tersebut memerlukan penyesuaian dan penguasaan angota dalam pergaulan hidup, terhadap keadaan yang baru itu.

Proses perubahan masyarakat dan kebudayaan yang dikehendaki dan direncanakan, biasanya dinamakan modernisasi. Proses ini pada intinya berarti meningkatkan kemampuan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang mencakup :

1. kebutuhan akan sandang
2. keselamatan terhadap harta benda dan jiwa
3. kesempatan yang wajar untuk dihargai
4. mendapat kasih sayang dari sesamanya
5. kesempatan untuk dapat mengembangkan kemampuan atau potensi

III. PENGERTIAN DAN PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT

Menurut Ach. Wazir Ws., *et al.* (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui



orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat ke-

dalam pengambilan keputusan;

2. Partisipasi adalah "pemekaan" (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk

5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika

persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

(a). Cakupan.

Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

(b). Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*).

Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, ke-

mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

(c) Transparansi.

Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

(d) Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*).

Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

(e) Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*).

Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

(f) Pemberdayaan (*Empowerment*).

Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan



kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

(g) Kerjasama.

Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia

IV. BENTUK DAN TIPE PARTISIPASI

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga partisipasi

pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif

bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam raneka

berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk partisipasi dan beberapa ahli yang mengungkapkannya dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi

Nama Pakar

(Hamijoyo, 2007: 21; Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)

(Hamijoyo, 2007: 21; Holil, 1980: 81 & Pasariibu dan Simanjutak, 2005: 11)

(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasariibu dan Simanjutak, 2005: 11)

(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasariibu dan Simanjutak, 2005: 11)

(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasariibu dan Simanjutak, 2005: 11)



Pemikiran Tentang Bentuk Partisipasi

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

(Hamijoyo, 2007: 21 & Pasari-bu dan Simanjutak, 2005: 11)

Partisipasi sosial, Partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

(Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)

Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.

(Chapin, 2002: 43 & Holil, 1980: 81)

Partisipasi representatif. Partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33) mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan *self mobilization*. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.

Tabel 2. Tipe Partisipasi

No.	Tipologi	Karakteristik
1.	Partisipasi pasif/ manipulatif	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi;(b) Pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; (c) Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2.	Partisipasi dengan cara memberikan informasi	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya;(b) Masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; (c) Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.

3. Partisipasi melalui konsultasi
(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi;(b) Orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat; (c) Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama; (d) Para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
4. Partisipasi untuk insentif material
(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya;(b) Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya; (c) Masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.
5. Partisipasi fungsional
(a) Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek;(b) Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati; (c) Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri.
6. Partisipasi interaktif
(a) Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada;(b) Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis; (c) Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.

7. *Self mobilization*

(a) Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki; (b) Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan; (c) Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Sumber: Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33)

Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi.

V. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angell (dalam Ross, 1967:

yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

1. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah "di dapur" yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan

adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutu-

dorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Penger- tiannya bahwa untuk berpar- tisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya ber- interaksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap keg- iatan lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10), unsur-unsur dasar partisi- pasi sosial yang juga dapat mem- pengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1. Kepercayaan diri masyarakat;

1. Solidaritas dan integritas sos- ial masyarakat;

2. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;

3. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;

4. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/ menjadi milik masyarakat;

5. Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyara- kat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan ke- pentingan umum yang semu karena penungggangan oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari ma- syarakat;

6. Organisasi, keputusan ra- sional dan efisiensi usaha;

7. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputu- san;

8. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap ma- salah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentin- gan umum masyarakat.



Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pemimpinnya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga



gan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

VI. PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi warga dapat dilihat dari perspektif manfaat yang bisa diperoleh dan biaya yang harus ditanggung. Kelompok relawan berfungsi sebagai penghubung antara individu dan struktur sosial yang lebih besar. Lima keuntungan yang bisa diperoleh dari partisipasi aktif masyarakat adalah:

1. Warga negara dapat membawa perubahan yang diinginkan dengan

keinginan seseorang, baik secara individu atau melalui kelompok masyarakat.

2. Individu belajar membuat perubahan yang diinginkan.
3. Warga belajar untuk memahami dan menghargai kebutuhan individu dan kepentingan dari semua kelompok masyarakat.
4. Warga belajar bagaimana untuk menyelesaikan konflik kepentingan untuk kesejahteraan umum kelompok.
5. Individu mulai memahami dinamika kelompok yang berlaku untuk kelompok-kelompok campuran.

mencatat bahwa hasil keterlibatan publik dalam keputusan yang lebih baik. Dia berpendapat bahwa keputusan masyarakat yang melibatkan warga negara cenderung lebih dapat diterima oleh masyarakat setempat. Partisipasi warga dalam urusan masyarakat berfungsi untuk memeriksa dan menyeimbangkan kegiatan politik. Partisipasi memungkinkan akses lengkap untuk manfaat masyarakat yang demokratis (Wade 1989). Cahn dan Camper (1968) menyarankan ada tiga alasan-alasan bagi partisipasi warga. Pertama, mereka berpendapat bahwa hanya mengetahui bahwa salah satu dapat berpartisipasi mempromosikan martabat dan kemandirian dalam diri individu. Kedua, itu keran energi dan sumber daya warga negara dalam masyarakat. Akhirnya, partisipasi warga menyediakan sumber wawasan khusus, informasi, pengetahuan, dan pengalaman, yang berkontribusi pada kesehatan solusi masyarakat. Hasilnya adalah penekanan pada pemecahan masalah untuk menghilangkan kekurangan dalam komunitas (Christensen & Robinson 1980).

Cook (1975) mencatat bahwa partisipasi warga dapat melegitimasi program, rencana, tindakan, dan kepemimpinan. Untuk melegitimasi sering dapat

keberhasilan dan kegagalan upaya masyarakat. Pemimpin yang tidak didukung sering menjadi putus asa dan kegiatan yang berpotensi bermanfaat bagi warga masyarakat menjadi terhambat. Partisipasi sukarela juga dapat mengurangi biaya untuk personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan banyak tugas-tugas yang terkait dengan tindakan masyarakat. Tanpa dukungan ini, sejumlah proyek berharga tidak akan pernah dicapai dalam banyak komunitas.

Setiap warga negara harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di masyarakat, pengambilan keputusan yang didelegasikan kepada orang lain tidak akan selalu berada dalam kepentingan terbaik bagi individu yang diwakili.

Organisasi yang tepat

Partisipasi warga dapat difasilitasi dengan struktur organisasi yang tepat. Kebanyakan warga hanya sebagian terlibat dalam bidang minat komunitas tertentu. Mereka sering merasa tidak kompeten untuk mengatur respon warga masyarakat 'kecuali alasan yang kuat untuk kepentingan masyarakat mereka. Dengan demikian, warga secara sukarela akan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat ketika mereka memiliki struktur organisasi yang sesuai tersedia bagi mereka untuk mengekspresikan

melihat organisasi sebagai rumit, memakan waktu, diktator, atau terlalu tidak efisien, mereka tidak akan bergabung, akan menarik diri setelah bergabung, atau ketidakpuasan mereka dapat dibuktikan dengan absensi yang tinggi, atau keengganan umum untuk mendukung atau koperasi.

Perludicatatbahwasemua organisasi masyarakat tidak akan mendapatkan respon serupa dari warga. Kelompok atau organisasi yang ada dari waktu ke waktu mengembangkan pola perilaku yang mungkin atau mungkin tidak kondusif untuk membuka partisipasi. Ekspresi tertulis atau verbal mungkin berbicara tentang kesediaan mereka untuk berpartisipasi. Namun, perilaku mereka dapat ditafsirkan sebaliknya.

Dengan cara yang sama, orang dengan reputasi buruk (ketidakjujuran, transaksi mencurigakan, dll) mungkin mengalami kesulitan yang sama mengorganisir kelompok pengembangan masyarakat luas. Kredibilitas diperlukan untuk partisipasi warga yang sukses.

Gaya Hidup Terancam

Situasi yang dapat mengancam gaya hidup masyarakat kemungkinan menimbulkan partisipasi masyarakat. Hal ini terutama berlaku pada isu-isu yang memiliki dampak tertentu pada masyarakat, seperti

fasilitas limbah padat, konsolidasi sekolah, atau pembentukan peraturan zonasi.

Apakah persepsi masyarakat adalah akurat atau tidak akurat membuat sedikit perbedaan. Jika mereka anggap terancam, mereka sering mengorganisir kelompok-kelompok relawan untuk melawan upaya-upaya untuk membangun perubahan. Ini adalah partisipasi warga, dan sering spontan dan luas. Partisipasi warga bisa pada salah satu atau kedua sisi dari sebuah isu. Prinsip yang terlibat dinyatakan sebagai berikut: Warga secara sukarela akan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat ketika mereka melihat beberapa aspek dari mereka dengan cara-hidup terancam.

Isu Mengancam sering tampak moral, sosial, ekonomi, agama, yang lain tidak dapat diterima ke grup. Semua masalah ini dianggap sebagai ancaman oleh warga setempat dan oleh karena itu, partisipasi warga telah meluas.

Pengetahuan yang lebih baik

Orang enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat ketika mereka tidak memiliki cukup informasi untuk bertindak secara bertanggung jawab. Isu-isu seperti pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir memerlukan pengetahuan yang banyak orang tidak punya. Mereka hanya tidak tahu bagaimana harus

mereka akan menghindari partisipasi selama mungkin atau sampai mereka memiliki apa yang mereka yakini sebagai informasi yang cukup. Jika dipaksa, mereka biasanya akan bertindak negatif. Ini aksi partisipatif dapat digeneralisasi sebagai berikut: Warga secara sukarela akan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat ketika mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik dari sebuah isu atau situasi.

Hal ini tidak biasa bagi para pemimpin dan profesional untuk menghabiskan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, belajar atau memperdebatkan suatu isu atau masalah yang kompleks. Setelah membentuk apa yang mereka anggap menjadi solusi yang masuk akal, itu adalah dorong pada warga masyarakat dengan harapan bahwa mereka harus segera bertindak atasnya. Pemahaman tidak datang dari informasi atau pengetahuan saja. Itu datang dari beratnya informasi terhadap pengetahuan dan pengalaman sebelumnya, serta menganalisis persepsi seseorang tentang situasi. Orang akan bertindak hanya setelah mereka memiliki waktu untuk memikirkan dan mendiskusikan masalah.

Sekali lagi, mereka akan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam urusan masyarakat jika mereka memahami masalah ini. Ketika mereka tidak mengerti

informasi yang terbatas dan oposisi akan terjadi.

Nyaman di Grup

Berpartisipasi sebagai anggotakelompok pengembangan masyarakat dapat hadir berbagai rintangan. Beberapa blok terlihat membuat calon peserta tidak nyaman. Orang-orang dengan pendapatan rendah, pendidikan kurang, status pekerjaan kurang, dan tingkat hidup yang lebih rendah cenderung untuk berpartisipasi dalam asosiasi-asosiasi sukarela dari orang-orang yang lebih tinggi. Perbedaan-perbedaan ini tercermin dalam nilai-nilai, harapan, dan gaya hidup. Sebagai aturan, perbedaan cenderung membuat orang tidak nyaman. Menyatakan positif: Warga secara sukarela akan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat ketika mereka merasa nyaman dalam kelompok.

Murray et. al. (1954) mengidentifikasi "takut" sebagai sebuah kondisi yang melemahkan partisipasi masyarakat. Tiga kondisi, berhubungan dengan rasa takut, sering menyebabkan orang merasa tidak nyaman dalam kegiatan kelompok. Pertama, mereka kadang-kadang merasa minder. Ini adalah takut mengungkap kebodohan seseorang, baik nyata atau imajiner. Kebanyakan orang merasa rendah diri dalam keadaan tertentu. Nilai tinggi ditempatkan pada pendidikan di masyarakat

orang dengan prestasi yang kurang pendidikan untuk merasa inferior.

Kedua, kelompok yang baru diselenggarakan sering menarik orang dari berbagai latar belakang, pengalaman, dan pelatihan. Sementara keragaman ini sering merupakan hal yang baik, itu tetap melemparkan orang ke dalam peran asing dan situasi. Situasi biasa membuat orang yang paling bahagia. Jadi, ketika seseorang tidak bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi, melawan biasanya pengalaman kecemasan (ketakutan yang tidak diketahui).

Akhirnya, perbedaan ditandai dalam gaya berpakaian dan bahasa membawa ketakutan dan takut diejek. Jika perbedaan yang cukup besar, mereka dapat mengakibatkan hilangnya partisipasi.

Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi warga dapat difasilitasi dengan menekankan manfaat yang bisa diperoleh. Ini hanya akan bekerja begitu lama maka manfaat harus menjadi jelas. Manfaat tidak berwujud serta nyata harus ditekankan. Ini sering diabaikan dan, sejauh ini, keuntungan yang benar tindakan masyarakat.

Partisipasi warga dapat difasilitasi dengan struktur organisasi yang tepat tersedia untuk mengekspresikan

membutuhkan mengorganisir kelompok yang lebih netral daripada mungkin ada dalam sebuah komunitas. Namun, dalam beberapa situasi, kelompok yang ada memadai. Penilaian situasi diperlukan oleh orang dengan pengalaman yang sesuai dan kompetensi.

Partisipasi warga dapat difasilitasi dengan membantu warga menemukan cara positif untuk merespon ketika cara-dari kehidupan mereka terancam. Kebanyakan orang ingin bertindak secara bertanggung jawab. Gunakan situasi ini untuk membantu orang menemukan cara positif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang mengancam.

Partisipasi warga dapat difasilitasi dengan menekankan komitmen atau kewajiban masing-masing dari kita memiliki untuk memperbaiki masyarakat. Namun, orang tidak akan terus berpartisipasi kecuali pengalaman adalah bermanfaat, atau setidaknya tidak terlalu menyenangkan.

Situasi krisis telah lama berhasil digunakan sebagai dasar untuk memperoleh partisipasi masyarakat. Krisis tidak harus diciptakan tetapi, jika mereka ada, mereka menjadi motivasi yang kuat. Penutupan pabrik besar, penutupan sekolah, hilangnya layanan kereta api, dan masalah narkoba utama adalah contoh ancaman terhadap

melayani sebagai titik kumpul bagi partisipasi masyarakat.

Yang paling positif dari semua pendekatan untuk memfasilitasi partisipasi yang lebih besar adalah untuk menyediakan warga negara dengan pengetahuan yang lebih baik. Jelas, pengetahuan harus dalam sistem nilai mereka. Ketika itu, pengalaman menunjukkan mereka biasanya bertindak sesuai. Waktu yang memadai dan sarana menyebarkan pengetahuan baru harus digunakan untuk hasil yang memuaskan.

Membantu melawan baru atau potensial merasa nyaman dengan kelompok mungkin memiliki potensi terbesar untuk mendapatkan dan menjaga warga negara dalam pekerjaan pembangunan masyarakat. Aspek ini sering diabaikan karena orang enggan untuk mengatakan mengapa mereka tidak nyaman. Alasan yang sering diberikan adalah bahwa mereka terlalu sibuk atau tidak punya waktu. Tapi, mereka benar-benar tidak nyaman dengan kelompok. Pertimbangan cermat masalah ini dapat sangat mengurangi masalah ini.

VII. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN

Hutan adalah karunia Tuhan, berfungsi sebagai penyangga ekosistem kehidupan yang memiliki fungsi ekologi,

bagi kehidupan umat manusia. Ketiga fungsi itu akan memberi kontribusi optimal bagi kehidupan manusia. Ketiganya berada pada posisi yang seimbang dalam tata lingkungan yang lestari. Untuk itu partisipasi dari semua pihak, stake holder dan masyarakat dalam pengelolaan hutan diperlukan sinergi yang terkait dengan norma pengelolaan hutan terpadu.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan yang dilakukan secara sentralistik memiliki beberapa kelemahan. Menurut Korten (1983), berdasarkan pengalaman pembangunan di beberapa negara berkembang di Afrika, Asia dan Amerika Latin, mengemukakan bahwa sistem pendekatan yang sentralistik memiliki empat (4) kelemahan yaitu:

1. Ketercapaiannya terbatas. Dalam hal ini tidak mungkin bagi para pekerja pemerintah untuk secara efektif sampai ke seluruh desa, khususnya pada wilayah-wilayah pedalaman yang terpencil;
2. Ketidakmampuan untuk melestarikan aksi-aksi lokal yang diperlukan;
3. Keterbatasan adaptibilitasnya terhadap kondisi lokal; dan
4. Menciptakan ketergantungan.

Sedangkan menurut teori partisipasi yang dikemukakan White (1981), bahwa partisipasi memiliki tiga (3) dimensi, sebagai berikut:

terlibat dalam pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana caranya;

- b. Kontribusi/sumbangan guna usaha pembangunan, misalnya bagi pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil; dan
- c. Turut menikmati terhadap keuntungan yang diperoleh dari program-program proyek.

Pengurusan hutan yang ada bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam pengurusan hutan pada Pasal 10 UU No. 41 Tahun 1999 Jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang bahwa, "pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:

- a. Perencanaan kehutanan;
- b. Pengelolaan hutan;
- c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan
- d. Pengawasan.

Hubungan antara negara dengan hutan dan negara dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan itu saling terkait. Tentu pada posisi ini setiap pihak

yang tepat sesuai dengan hak dan kewajiban, Misalnya kedudukannya negara sebagai organisasi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta mengatur pengurusan hutan dalam arti luas. Sedangkan masyarakat yang bersentuhan secara langsung dengan hutan dapat menjaga dan melastarkan hutan sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang ada

Di sisi lain hubungan hutan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang mempunyai hubungan yang erat. Dalam hal ini karena masyarakat telah mengusahakan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sehingga pengurusan dan pemanfaatan diatur yang bersangkutan. Namun demikian, individu tersebut harus membayar beberapa kewajiban kepada negara, seperti membayar pengujian, dan Iuran Hasil Hutan (IHH).

Kelemahan pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan selama ini bahwa pemerintah pusat melakukan otonomi daerah setengah hati. Walaupun sudah ada UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Keberadaan UU No. 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa yang secara tidak langsung

pengelolaan hutan sesuai dengan kearifan lokal setempat.

Ke depan pemerintah lebih menekankan pengelolaan hutan pada partisipasi masyarakat secara penuh dan pemberdayaan nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan demi kesejahteraan dan kemakmuran kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir WS., et al., ed. (1999). Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AUSAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Conyers, Diana. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia ketiga. Yogyakarta: UGM Press.
- Holil, Soelaiman. (1980). Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial. Bandung.
- Isbandi, Rukminto Adi. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press.
- Iswantoro, H., 1996. Pendekatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan. Lokakarya Bina Desa Hutan, Balikpapan.
- Khotija Siti. 2009. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat. <http://gagasanhukum.wordpress.com>
- Mikkelsen, Britha. (1999). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ross, Murray G., and B.W. Lappin. (1967). Community Organization: theory, principles and practice. Second Edition. NewYork: Harper & Row Publishers.
- Slamet, Y.1989. Konsep-konsep Dasar Partisipasi Sosial. Pusat Antar Universitas-Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soetrisno, L., 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Sumampouw, Monique. (2004). "Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif." Jacob Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita. 91-117.
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan rakyat. [http :// ammanngyu.blogspot. com](http://ammangnyu.blogspot.com)

"Gerbang Balitbangdaku"